

IJPPR

INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC POLICY REVIEW



Table Of Contents

Journal Cover	1
Author[s] Statement	3
Editorial Team	4
Article information	5
Check this article update (crossmark)	5
Check this article impact	5
Cite this article	5
Title page	6
Article Title	6
Author information	6
Abstract	6
Article content	7

Originality Statement

The author[s] declare that this article is their own work and to the best of their knowledge it contains no materials previously published or written by another person, or substantial proportions of material which have been accepted for the published of any other published materials, except where due acknowledgement is made in the article. Any contribution made to the research by others, with whom author[s] have work, is explicitly acknowledged in the article.

Conflict of Interest Statement

The author[s] declare that this article was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright Statement

Copyright © Author(s). This article is published under the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) licence. Anyone may reproduce, distribute, translate and create derivative works of this article (for both commercial and non-commercial purposes), subject to full attribution to the original publication and authors. The full terms of this licence may be seen at <http://creativecommons.org/licences/by/4.0/legalcode>

Indonesian Journal of Public Policy Review

Vol. 26 No. 2 (2025): April
DOI: 10.21070/ijppr.v26i2.1449

EDITORIAL TEAM

Editor in Chief

Ilmi Usrotin Choiriyah, Departement Of Administration - Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Managing Editor

Hendra Sukmana, S.A.P., M.K.P., Departement of State Administration - Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Section Editor

Sulikah Asmowati, Departement Of Administration - Universitas Airlangga, Indonesia

Hasniati, Departement Of Administration - Universitas Hasanuddin, Indonesia

Noviyanti, Departement Of Administration - Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

Bartosz Nieścior, Legal Advisor; Director of Development, PROZAP sp. z o.o., Grupa Azoty Puławy; Cardinal Stefan Wyszyński University, Warsaw

Bulekbaeva Sholpan Buxarbaevna, Teacher of the Kazakh Language and Literature Department of Navoi State Pedagogical Institute, Uzbekistan

Qurbonova Shakhnoza Ergashevna, Senior Lecturer, Samarkand Institute of Veterinary Medicine, Uzbekistan

Bayu Mitra A. Kusuma, College of Humanities and Social Sciences - National Dong Hwa University, Taiwan

Choliyeva Vasila Erkinovna, Navoi State Pedagogical Institute, Uzbekistan

Rafał Śpiewak, Assistant Professor, Institute of Management & Economics of Tourism Services, University of Economy in Bydgoszcz, Poland

Kuchchiyev Oxunjon Razzakavich, Faculty of Zoo Enginary, Tashkent Branch of Samarkand Institute of Veterinary Medicine, Uzbekistan

Narzullayev Umidjon Qrtiqovich, Associate Professor of the Department of Methods of Teaching History, Navoi State Pedagogical Institute, Uzbekistan

Isnaini Rodiyah, Departement Of Administration - Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Maia Kapanadze, Caucasus International University, Georgia

Complete list of editorial team ([link](#))

Complete list of indexing services for this journal ([link](#))

How to submit to this journal ([link](#))

Article information

Check this article update (crossmark)



Check this article impact ^(*)



Save this article to Mendeley



^(*) Time for indexing process is various, depends on indexing database platform

Limited Mentoring Resources Hinder PROPER Compliance in Pasuruan Regency: Sumber Daya Pembimbingan yang Terbatas Menghambat Kepatuhan terhadap PROPER di Kabupaten Pasuruan

Sumber Daya Pembimbingan yang Terbatas Menghambat Kepatuhan terhadap PROPER di Kabupaten Pasuruan

Dana Suhartati, ilmiusrotin@umsida.ac.id, ()

Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia, Indonesia

Ilmi Usrotin Choiyirah, ilmiusrotin@umsida.ac.id, ()

Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia, Indonesia

⁽¹⁾ Corresponding author

Abstract

General Background: Sustainable development mandates that corporations prioritize environmental stewardship, necessitating policy instruments like PROPER to promote performance beyond regulatory compliance. **Specific Background:** The Environmental Service of Pasuruan Regency (DLH) is tasked with providing mandatory assistance to companies participating in the PROPER program. **Knowledge Gap:** The actual effectiveness of this local PROPER mentoring, especially under resource constraints, remains underexplored using formal organizational effectiveness models. **Aims:** This study aims to analyze the Effectiveness of the PROPER Mentoring Program at the DLH Pasuruan Regency, employing M. Richard Steers' indicators: Goal Achievement, Integration, and Adaptation. **Results:** **Goal Achievement** faces significant obstacles due to a severe imbalance between the number of mentors and 50 participating companies. Conversely, **Integration** efforts are proactive in aligning goals and **Adaptation** involves active technical guidance. **Novelty:** This research distinctly identifies the critical constraint of human resource availability as the main barrier to achieving *beyond compliance* targets within the PROPER system at the regional level. **Implications:** To maximize effectiveness, DLH Pasuruan must urgently address the personnel gap, potentially through technology or non-technical staff mobilization, to ensure intensive mentoring and better goal attainment.

Highlights

Mentor-to-company ratio is severely imbalanced, hindering intensive assistance.

Limited human resources directly compromise Goal Achievement and Adaptation indicators.

The Environmental Service proactively demonstrates integration by aligning its goals for compliance.

Keywords: Environmental Performance, Mentoring, PROPER, Resource Constraint, Steers Model.

Published date: 2025-03-07

Pendahuluan

Kinerja lingkungan perusahaan merupakan pilar fundamental dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan, terutama di era di mana isu-isu lingkungan global semakin mendesak untuk ditangani. Aktivitas industri, meskipun menjadi motor penggerak ekonomi, seringkali menyisakan jejak ekologis yang signifikan, mulai dari emisi polutan, limbah padat dan cair, hingga penggunaan sumber daya alam yang tidak efisien [1]. Oleh karena itu, upaya untuk mendorong perusahaan agar tidak hanya mematuhi regulasi lingkungan tetapi juga melampaui kepatuhan (*beyond compliance*) menjadi sangat esensial. Dalam konteks Indonesia, pemerintah telah menginisiasi berbagai instrumen kebijakan untuk mencapai tujuan tersebut, salah satunya adalah Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER). PROPER adalah program insentif dan disinsentif yang bertujuan untuk meningkatkan ketaatan perusahaan terhadap peraturan lingkungan hidup dan mendorong perusahaan yang sudah taat untuk mencapai kinerja lingkungan yang lebih baik melalui penerapan sistem manajemen lingkungan, efisiensi energi, penurunan emisi gas rumah kaca, pengurangan dan pemanfaatan limbah B3, serta konservasi air dan keanekaragaman hayati [2]. Program ini menjadi alat strategis bagi pemerintah untuk mendorong praktik bisnis yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan, sejalan dengan komitmen nasional dan internasional terhadap perlindungan lingkungan [3].

Di sisi lain, sektor industri dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional [4]. Hal ini didorong oleh tingginya tingkat konsumsi masyarakat dan meningkatnya investasi di sektor industri secara signifikan. Total investasi yang masuk dalam rangka pembangunan industri mencapai 400 miliar rupiah dan mayoritas berada di Pulau Jawa sebesar 57,76% [5]. Tidak dapat dipungkiri bahwa pertumbuhan industri mampu menjadi penopang ekonomi bangsa, memenuhi kebutuhan masyarakat dan mengurangi pengangguran dengan hadirnya lapangan pekerjaan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, pertumbuhan industri tanpa disadari juga menimbulkan dampak terhadap pencemaran lingkungan. Isu terkait pencemaran lingkungan sebenarnya sudah diatur oleh pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup [6]. Salah satu upaya pemerintah dalam melakukan pengawasan dan perlindungan terhadap lingkungan hidup yakni melalui Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER). PROPER merupakan program unggulan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mendorong ketaatan industri terhadap peraturan lingkungan hidup. Pelaksanaan PROPER telah diatur di dalam Peraturan Menteri No. 3 Tahun 2014 tentang PROPER [7].

Peran pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup (DLH), menjadi sangat vital dalam implementasi PROPER di tingkat lokal. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan, sebagai garda terdepan dalam pengelolaan lingkungan di wilayahnya, memiliki tanggung jawab untuk tidak hanya mengawasi, tetapi juga memberikan pendampingan kepada perusahaan-perusahaan agar dapat memenuhi kriteria PROPER dan secara progresif meningkatkan kinerja lingkungan mereka. Pendampingan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari sosialisasi regulasi terbaru, bimbingan teknis dalam implementasi teknologi ramah lingkungan, asistensi dalam penyusunan laporan keberlanjutan, hingga fasilitasi dialog antara perusahaan dan pemangku kepentingan lainnya [8]. Efektivitas dari program pendampingan yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan ini perlu dievaluasi secara komprehensif untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, serta area yang memerlukan perbaikan. Pertanyaan mendasar yang muncul adalah sejauh mana pendampingan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan benar-benar mampu mendorong peningkatan kinerja lingkungan perusahaan, khususnya dalam konteks program PROPER, mengingat tantangan dan sumber daya yang tersedia.

Untuk menganalisis efektivitas pendampingan ini, penelitian ini akan menggunakan kerangka teori efektivitas organisasi yang dikemukakan oleh M. Richard Steers. Steers (1977) mengemukakan bahwa efektivitas organisasi adalah sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Ia mengidentifikasi tiga indikator utama untuk mengukur efektivitas, yaitu: (1) Pencapaian Tujuan (*Goal Achievement*), yang mengukur sejauh mana organisasi berhasil mencapai sasaran formal dan informalnya, seperti target produksi, kualitas, atau dalam konteks ini, peningkatan peringkat PROPER; (2) Integrasi (*Integration*), yang mencerminkan kemampuan organisasi untuk menyatukan berbagai bagian dan anggotanya, serta berinteraksi secara harmonis dengan lingkungan eksternal demi mencapai tujuan bersama, yang meliputi koordinasi internal dan kolaborasi eksternal; dan (3) Adaptasi (*Adaptation*), yang merujuk pada kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi lingkungan, baik internal maupun eksternal, untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan efektivitasnya dalam jangka panjang [9]. Dalam konteks pendampingan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan terhadap perusahaan dalam program PROPER, efektivitas dapat diartikan sebagai kemampuan program pendampingan untuk membantu perusahaan mencapai peringkat PROPER yang lebih tinggi (pencapaian tujuan), membangun sinergi dan kolaborasi yang kuat antara Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan dan perusahaan (integrasi), serta membantu perusahaan beradaptasi dengan regulasi lingkungan yang terus berkembang dan tantangan lingkungan yang dinamis (adaptasi).

Program PROPER, yang diinisiasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia, adalah instrumen kebijakan yang unik karena tidak hanya berfokus pada kepatuhan (*compliance*) tetapi juga pada kinerja lingkungan yang melampaui kepatuhan (*beyond compliance*). Perusahaan dinilai berdasarkan berbagai kriteria yang komprehensif, mulai dari sistem manajemen lingkungan, efisiensi energi, penurunan emisi gas rumah kaca, pengurangan dan pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), konservasi air, hingga perlindungan keanekaragaman hayati dan pemberdayaan masyarakat. Peringkat yang diberikan (Emas, Hijau, Biru, Merah, Hitam) menjadi cerminan tingkat kinerja lingkungan perusahaan, di mana peringkat Emas menunjukkan kinerja terbaik dan Hitam menunjukkan ketidakpatuhan. Bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan, program PROPER ini menjadi salah satu alat utama untuk mengukur dan mendorong perbaikan kinerja lingkungan di sektor industri lokal. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan berperan dalam sosialisasi kriteria PROPER, pembinaan teknis, pengawasan kepatuhan, dan tentu saja, pendampingan intensif kepada perusahaan-perusahaan yang menjadi target PROPER agar mereka dapat memenuhi standar

dan bahkan melampaui ekspektasi regulasi (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2017). Berikut merupakan dokumentasi laman Sistem Informasi Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup dalam menunjang program Proper sebagai berikut :

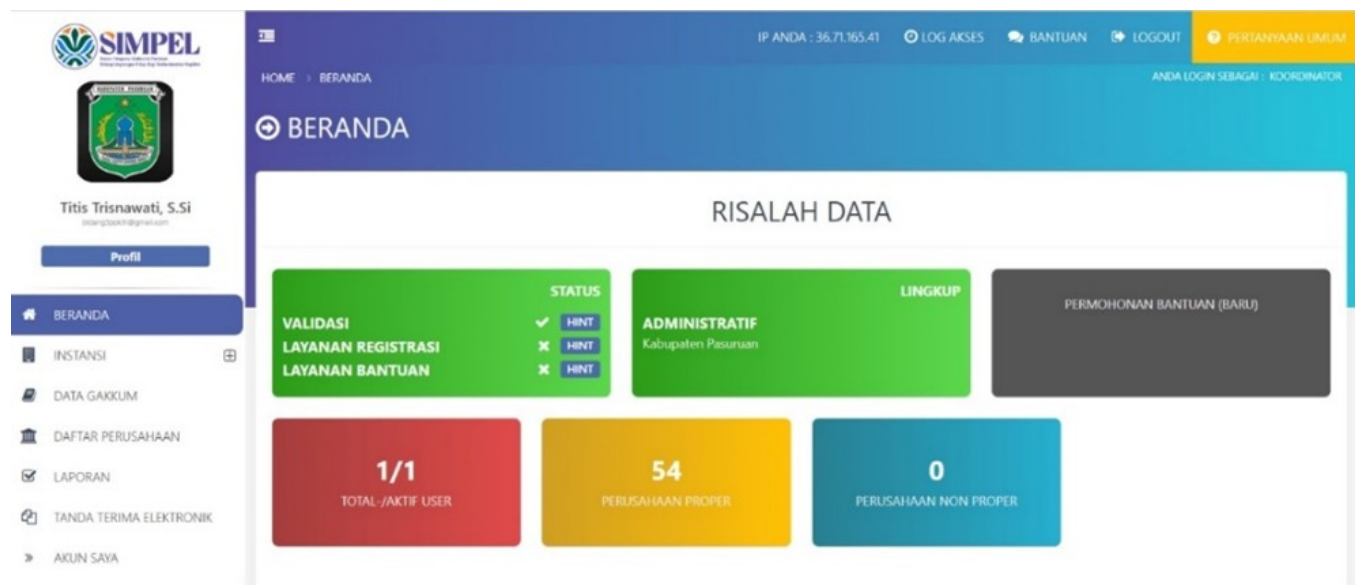


Figure 1. Gambar 1. Dokumentasi Halaman Awal Sistem Informasi Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan, 2025

Berdasarkan gambar 1 dapat diketahui bahwa sistem informasi pelaporan elektronik lingkungan hidup (SIMPEL) adalah platform digital yang dirancang untuk memfasilitasi pengumpulan, pengelolaan, dan analisis data lingkungan hidup secara efisien. Salah satu fungsi utamanya adalah untuk menunjang pengumpulan laporan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER). SIMPEL menyediakan format pelaporan yang terstandarisasi, memastikan bahwa semua perusahaan peserta PROPER mengirimkan data dalam bentuk yang seragam. Ini memudahkan proses verifikasi dan analisis oleh pihak berwenang. Bagi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), SIMPEL memungkinkan pengelolaan data laporan PROPER dalam skala besar dengan lebih efisien. Data dapat diakses, diurutkan, dan dianalisis dengan cepat untuk penilaian kinerja perusahaan. Dengan adanya SIMPEL tidak hanya menyederhanakan proses pelaporan bagi perusahaan, tetapi juga memperkuat kemampuan pemerintah dalam memantau, mengevaluasi, dan meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia melalui program PROPER.

Namun, dalam pelaksanaan pendampingan program PROPER di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan, terdapat permasalahan krusial yang berpotensi menghambat efektivitas program secara keseluruhan. Permasalahan utama yang teridentifikasi adalah jumlah pendamping pada program PROPER yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan jumlahnya tidak sebanding dengan jumlah perusahaan yang harus didampingi. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa jumlah perusahaan di Kabupaten Pasuruan yang menjadi target atau berpotensi menjadi peserta PROPER sangat banyak dan beragam, mulai dari skala kecil, menengah, hingga besar, dengan karakteristik industri dan kompleksitas masalah lingkungan yang berbeda-beda. Rasio antara jumlah pendamping dan jumlah perusahaan sangat timpang, di mana satu pendamping harus menangani puluhan. Kesenjangan antara rasio pendamping dan perusahaan ini menimbulkan beberapa implikasi serius. Pertama, pendampingan yang diberikan cenderung tidak dapat dilakukan secara intensif dan personal untuk setiap perusahaan. Para pendamping mungkin hanya mampu memberikan bimbingan umum atau kunjungan yang terbatas, tanpa bisa mendalami masalah spesifik yang dihadapi masing-masing perusahaan secara optimal. Kedua, keterbatasan jumlah pendamping juga berarti beban kerja yang sangat tinggi bagi setiap individu pendamping, yang dapat mengurangi kualitas dan kedalaman pendampingan yang diberikan. Mereka mungkin kesulitan untuk memantau progres perusahaan secara berkala, memberikan masukan teknis yang detail, atau membantu perusahaan dalam menyusun strategi perbaikan yang komprehensif, sehingga efektivitas bimbingan menjadi terkompromi. Berikut merupakan tabel data pegawai Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan Sebagai berikut :

Jabatan	Pendidikan	Jumlah
---------	------------	--------